



**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN DAMPAKNYA PADA INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI WILAYAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR**

TESIS

Oleh

ANES LILIA KUSUMASTUTI, S.Kom

NIM.

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bapak/ibu

Kakak

adik

Almamater

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

2012

PERSETUJUAN

TESIS ATAS NAMA: ANES LILIA KUSUMASTUTI, S.KOM (NIM.) DENGAN JUDUL:

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR

TELAH DISETUJUI

Tanggal :2013

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr. Niken

NIP.

Pembimbing Anggota,

Dr. Rafael

NIP.

Mengetahui/Menyetujui:

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Rafael

NIP.

PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anes Lilia Kusumastuti, S.Kom
NIM : 08
Program Studi : ILMU EKONOMI
Kosentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Telah dipertahankan di depan Tim Pembimbing/Penguji pada tanggal :
.....2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

Susunan Tim Pembimbing/Penguji

Ketua,

Dr.
NIP.

Anggota I

Anggota II

Dr. Niken
NIP. 01

Dr.Rafael
NIP.

Mengesahkan:
Dekan,

Prof.Dr. H. Mohammad Saleh.M.Sc
NIP. 195608311984031002

P R A K A T A

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, karena hanya berkat petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Tertulis (TESIS) ini. Karya Ilmiah Tertulis yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Pada Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur**” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program pasca sarjana strata-2 di Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Jember.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat, selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan, selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Jember
4. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
5. Semua pihak yang juga telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulis merasa bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat penulis harapkan, untuk perbaikan dalam penulisan-penulisan berikutnya..

Jember, 2012

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Pada Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur

Anes Lilia Kusumastuti

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tapal kuda, serta dampak pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda. Hal ini dilakukan karena secara demografi wilayah tapal kuda merupakan daerah terbelakang dibanding dengan daerah lain di Jawa timur.

Metode penelitian menggunakan data panel untuk regresi linier berganda dengan model Fixed Effect untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh di seluruh kabupaten/kota di wilayah tapal kuda. Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program pengolah data Eviews dihasilkan bahwa model memenuhi syarat asumsi klasik sehingga mendapatkan persamaan regresi yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimators).

Hasilnya dari estimasi regresi data panel bahwa semua variabel bebas PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAU berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tapal kuda. Sementara hasil analisis kausalitas Granger didapatkan bahwa pada lag-2 IPM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pada lag-5 didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM saling mempengaruhi.

Kata kunci : PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PRAKATA.....	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.3 Dana Alokasi Umum.....	16
2.1.4. Dana Alokasi Khusus	19
2.1.5 Indek Pembangunan Manusia	22
2.2. Hasil Penelitian sebelumnya.....	26
2.3. Kerangka Konseptual	30
2.4. Hipotesis.....	32
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32

3.2. Unit Analisis	32
3.3. Jenis dan Sumber Data	32
3.4. Teknik Analisis Data	32
3.4.1 Analisis Panel Data	32
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	34
3.4.3 Uji Hipotesis	38
3.4.4 Uji Kausalitas Granger	40
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Wilayah Tapal Kuda.....	42
4.1.1 Perekonomian	44
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	45
4.1.3. Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda	47
4.1.4. Dana Alokasi Umum.....	50
4.1.5 Dana Alokasi Khusus.....	52
4.1.6 Pembangunan Manusia di Wilayah Tapal Kuda.....	54
4.2. Analisis Data	58
4.2.1. Etimasi Data Panel	58
4.2.2. Uji Hipotesis	59
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	61
4.2.4 Uji Kausalitas Granger	64
4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi	65
4.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM	70
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan.....	74

5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	78



DAFTAR TABEL

2.1 Konversi Jenjang Pendidikan	25
2.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	29
4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur 2002-2011 (ADHK 2000)	41
4.2 Kapasitas Fiskal Wilayah Tapal Kuda 2002 - 2011.....	48
4.3 Kemandirian Fiskal Daerah di Wilayah Tapal Kuda.....	49
4.4 Dana Alokasi Umum.....	51
4.5 Dana Alokasi Khusus.....	53
4.6 Hasil Estimasi Panel Data dengan Model <i>Fixed Effect</i>	59
4.7 Tabel 4.7 Cross-section Fixed (Dummy Variables).....	61
4.8 Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	62
4.9 Hasil Uji Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan IPM	64

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2007 – 2011	3
2.2 Kerangka Pemikiran	30
3.1 Wilayah Penerimaan Uji Durbin Watson.....	37
4.1 Peta Wilayah Tapal Kuda.....	43
4.2 Trend Pendapatan Asli Daerah Wilayah Tapal Kuda 2002 - 2011	49
4.3 Trend Dana Alokasi Umum Wilayah Tapal Kuda 2002 – 2011	52
4.4 Trend Dana Alokasi Khusus Wilayah Tapal Kuda 2002 – 2011	54
4.5 IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda.....	55
4.6 Penyebaran IPM di Wilayah Tapal Kuda Th 2011	57
4.7 Uji Statistik Durbin Watson.....	63
4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	63

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur (Juta Rupiah)	78
2. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur (Juta Rupiah)	79
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur (Juta Rupiah)	80
4. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)	81
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur	82
6. Hasil Analisis Model Data Panel	83
7. Hasil Uji Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan IPM	89

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA PADA
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH
TAPAL KUDA JAWA TIMUR**

Disusun

Oleh

ANES LILIA KUSUMASTUTI, S.Kom

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di berbagai sektor. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberi dampak positif memunculkan kesempatan identitas lokal masing-masing daerah untuk berkembang. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah akan lebih tepat sasaran sehingga akan lebih efisien menggerakkan perekonomian. Disamping peluang-peluang yang muncul dari pelaksanaan otonomi daerah, terdapat sejumlah tuntutan dan tantangan yang harus diantisipasi agar tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Diantara tantangan yang dihadapi oleh daerah adalah tuntutan untuk mengurangi ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat, pemberian pelayanan publik yang dapat menjangkau seluruh

kelompok masyarakat, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan peningkatan otonomi masyarakat lokal dalam kemandirian ekonomi. Tentu saja tujuannya adalah agar pembangunan dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat maka dalam prosesnya harus melibatkan masyarakat.

Berkaitan dengan ciri kemampuan suatu daerah dalam berotonomi seperti yang diuraikan di atas maka diharapkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenyataannya pelaksanaan otonomi daerah masih belum sesuai dengan konsep. Dalam prakteknya dana perimbangan atau transfer dana dari pusat masih menjadi sumber penerimaan dominan bagi daerah. Untuk pemerintah provinsi sekitar 70 – 80 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari transfer pemerintah pusat, sementara untuk kabupaten/kota sebesar 80 – 90 persen (Samhadi,2005). Pelaksanaan dan pengembangan jasa publik masih mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kontribusi DAU bagi sebagian besar daerah masih sangat penting, terbukti sampai saat ini APBD kabupaten/kota di Jawa Timur sebagian besar masih bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Jawa Timur sebagai salah satu kawasan strategis dalam perekonomian nasional selalu menarik untuk dicermati. Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2007-2011 yang meningkat rata-rata 6,19% per tahun. Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Jatim mampu mencapai 7,2 persen di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,50%. Namun yang menjadi pertanyaan dengan keberhasilan tersebut adalah bahwa apakah sudah bisa dinikmati secara merata, disamping itu meningkatnya pertumbuhan ekonomi apakah sudah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan Indonesia.



Sumber: Jawa Timur dalam Angka

Prestasi membanggakan yang dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik ini ternyata tidak bisa mencerminkan keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur. Kenyataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum memberi manfaat banyak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk IPM tahun 2005, berdasarkan data BPS, Jawa Timur menduduki peringkat terbawah dibandingkan dengan semua provinsi di Pulau Jawa. Peringkat IPM Jawa Timur, yakni 22 dari 33 provinsi di Indonesia, berada di antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Permasalahan yang harus dihadapi akibat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang tidak merata adalah terciptanya kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota menjadikan provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, sebagian daerahnya masih tertinggal karena sumber daya yang rendah. Beberapa daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Kawasan Tapal Kuda selama ini masih dikenal sebagai kantong kemiskinan di Jawa Timur. Kemiskinan dan keterbelakangan di wilayah ini juga memperlihatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Tapal Kuda.

Tahun 2005 IPM terendah di Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang, menyusul kemudian wilayah di sekitar tapal kuda, yakni Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Ironisnya, sejak memasuki periode lima tahun kedua pasca desentralisasi, pada tahun 2007 hingga 2011, posisi IPM keempat kabupaten

itu belum beranjak dari posisi terendah dan belum dapat mengejar ketertinggalan. Pertumbuhan dan dinamisme provinsi ini secara keseluruhan sangat menonjol dan kemakmuran relatif di daerah-daerah yang lebih kaya, meskipun demikian beberapa daerah masih menderita kemiskinan endemik, terutama di Pulau Madura yang sering diserang kekeringan dan daerah-daerah pegunungan kapur yang memanjang di utara dan selatan Jawa Timur.

Persebaran sumber daya, baik SDM maupun SDA yang tidak merata, keterbatasan tenaga kerja, barang modal dan teknologi sebagai pendukung kehidupan, khususnya jumlah orang bekerja, belanja modal pemerintah dan pendidikan berimplikasi tertinggalnya wilayah tapal kuda. Bagi wilayah tapal kuda yang rendah potensi sumber daya manusia, sumber daya alam maupun alternatif lainnya, pertumbuhan ekonominya lambat yang akan mengakibatkan ketertinggalan dalam pembangunan manusianya. Dalam kondisi tersebut maka transfer pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut sangat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Bila melihat keadaan sekarang ini kiranya banyak hal yang harus dibenahi dalam upaya pembangunan di wilayah tapal kuda. Pembangunan ekonomi yang dipacu selama ini ternyata justru semakin menenggelamkan masyarakat di wilayah tapal kuda ke dalam jurang kesengsaraan dan kemiskinan. Belum siapnya sumber daya manusia untuk mengisi pembangunan menyebabkan masyarakat tapal kuda lebih banyak menjadi penonton daripada ikut berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi di wilayah ini. Dengan kondisi yang demikian sudah seyakinya mestinya peningkatan pendapatan, pendidikan dan kesehatan penduduk dimasing-masing daerah menjadi fokus perhatian pemerintah dalam rangka melakukan pelayanan publik, karena pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang baik akan menjadi input pembangunan manusia yang potensial dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang diinginkan. Kesejahteraan manusia disamping sebagai tujuan akhir pembangunan juga merupakan modal tersedianya sumber daya bagi masyarakat di wilayah tapal kuda untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Pendapatan asli daerah merupakan komponen penting untuk membiayai keperluan daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi. Daerah dengan PAD besar memiliki kemandirian untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sementara daerah dengan PAD kecil lebih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya dana transfer pemerintah pusat bisa menjadikan ketergantungan daerah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa kontribusi empiris dari pengaruh DAK, DAU, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bahan kajian dan bahan referensi serta data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Putra, 2009). Sedangkan Kuznet (dalam Jhingan, 2000:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Pengertian yang lain dari pertumbuhan ekonomi dikemukakan Sukirno (2004:435) ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada suatu proses untuk memperoleh output, dimana ukuran pencapaian memerlukan jangka panjang.

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ricardo

Ricardo terkenal dengan teori *the law of diminishing returns*. Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka tenaga kerja akan terus bertambah, hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada akhirnya akan menekankan tingkat upah ke bawah.

Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing returns* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Proses ini adalah proses tarik menarik antara kekuatan dinamis yaitu *the law of diminishing returns* dan kemajuan teknologi. Ricardo memberi penegasan bahwa suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber daya alamnya.

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan (Solow-Swan)

Teori ini memandang bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja dan perubahan dalam produktivitas. Perbedaan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara, sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi. Dengan mengasumsikan suatu tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model pertumbuhan Solow-Swan dapat menghasilkan berapa tingkat pendapatan perkapita suatu negara. Bentuk fungsi produksi dalam model pertumbuhan Solow adalah:

$$Q = f(K, L); K, L > 0$$

Pada persamaan di atas Q adalah output bersih sesudah depresiasi, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Menurut Romer dan Well (dalam Nazara, 1994:22) model di atas diperbaiki dengan memecah *total factor productivity* dengan cara memasukkan variabel lain, yang dapat menjelaskan pertumbuhan. Model pertumbuhan ini selanjutnya disebut dengan model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Dalam model pertumbuhan endogen ini dicari variabel yang dapat dimasukkan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Salah satu variabel yang dianggap dapat ikut menjelaskan pertumbuhan dari suatu ekonomi adalah variabel sumber daya manusia.

Pada tahap selanjutnya Solow berusaha memasukkan variabel perubahan teknologi dalam model pertumbuhan. Variabel perubahan teknologi ini menggambarkan kondisi pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, dimana saat teknologi berkembang maka tingkat efisiensi tenaga kerja juga akan naik. Dengan adanya kemajuan teknologi, model Solow akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang dialami oleh berbagai Negara. Model Solow menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi *steady-state* dicapai. Dengan penambahan variabel baru ini maka persamaan awal dari Solow berubah menjadi:

$$Y = f(K, L \times E)$$

Pada persamaan di atas E adalah variabel baru dari teknologi yang selanjutnya disebut dengan efisiensi tenaga kerja, sedangkan $L \times E$ menunjukkan jumlah tenaga kerja yang efektif. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa jumlah output (Y) adalah tergantung pada jumlah unit modal (K) dan jumlah pekerja yang efektif ($L \times E$).

2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:

- a. Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan dan sikap yang masih primitif, dan berfikir irasional.
- b. Prasyarat lepas landas, adalah suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*selfsustained growth*).

- c. Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru.
- d. Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.
- e. Masyarakat berkonsumsi tinggi, adalah suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

2.1.1.5 Teori Pertumbuhan Mantap Harrod-Domar

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999:58). Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar, ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal dan jumlah produksi nasional.

2.1.1.6 Teori Pertumbuhan Modern

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang yang tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologis. Menurut Kuznet (dalam Jhingan:2000:73), terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya, yaitu: 1) laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita, 2) peningkatan produktivitas, 3) laju perubahan struktural yang tinggi, 4) urbanisasi, 5) ekspansi negara maju, dan 6) arus barang, modal dan orang antar bangsa.

Pada sekitar tahun 1980 Romer memperkenalkan tentang teori pertumbuhan ekonomi baru (*New Growth Theory*). Teori pertumbuhan baru pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen yang lahir sebagai respon dan

kritik terhadap model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik Solow. Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi public dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Motivasi dasar dari teori NGT adalah menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan negara dari proporsi yang lebih besar dari pertumbuhan yang diamati.

Persamaan teori endogen dapat dituliskan dengan $Y=AK$. Dalam formulasi ini, A adalah faktor yang mempengaruhi teknologi, K adalah modal fisik dan modal manusia. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada hasil yang menurun (*diminishing returns*) atas capital dalam formula tersebut. Akibatnya kemungkinan yang bisa terjadi adalah investasi dalam modal-modal fisik dan manusia dapat menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktifitas yang melebihi penghasilan yang cukup untuk menutup *diminishing returns*. Implikasi dari penekanan terhadap pentingnya tabungan dan investasi pada modal oleh teori NGT adalah tidak ada kekuatan yang menyamakan tingkat pertumbuhan antarnegara, serta tingkat pertumbuhan nasional yang konstan dan tingkat teknologi. Konsekuensinya, bagi negara yang miskin modal manusia dan fisik sulit untuk menyamai tingkat pendapatan per kapita negara yang kaya capital, walaupun memiliki tingkat tabungan nasional yang sama besar.

Rahardja (2001:152) menjelaskan dalam teori ini disebut bahwa teknologi bersifat endogenus. Hal ini karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap (*fixed input*) sehingga mengakibatkan terjadinya *The Law of Diminishing Return*. Dalam jangka panjang yang lebih serius dari memperlakukan teknologi

sebagai faktor eksogen dan konstan adalah perekonomian yang lebih dulu maju akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan dan akses terhadap teknologi adalah sama. Teknologi merupakan barang publik. Artinya teknologi dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat walaupun bukan si penemu teknologi tersebut dan tanpa mengeluarkan biaya riset atau penelitian. Sehingga dalam hal ini teknologi disebut sebagai faktor endogen.

2.1.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB oleh Sukirno (2004:17) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomis. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB yaitu:

1. Pendekatan produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB dihitung melalui akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/propinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 9 lapangan usaha:

1. pertanian;
2. pertambangan dan penggalian;

3. industri pengolahan;
 4. listrik, gas dan air bersih;
 5. bangunan;
 6. perdagangan, hotel dan restoran;
 7. angkutan dan komunikasi;
 8. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
 9. jasa-jasa.
2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini, merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

3. Pendekatan pengeluaran

PDRB adalah semua komponen pengeluaran aktif seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang didapat atau diperoleh adalah (Kuncoro, 2004:110):

1. PDRB harga berlaku/nominal
 - a. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/propinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.
 - b. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/propinsi.
2. PDRB harga konstan
 - a. Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.
 - b. Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri, perdagangan antara pulau/antar propinsi.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Widjaja (2007:42), pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang digali oleh pemerintah daerah melalui usaha-usaha yang dilakukan. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan (Halim, 2002:32), yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- a) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor

- (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
- c) Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
- Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
4. Lain-lain PAD yang sah
- Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - Penerimaan jasa giro.
 - Penerimaan bunga deposito.
 - Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR).

2.1.3 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Suparmoko,2001:57).

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri *netto*. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri *netto*.

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga kesenjangan antara daerah maju dan belum berkembang dapat di perkecil (Widjaja, 2007:26). Dana alokasi umum digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang penggunaannya di tentukan oleh daerah.

2.1.3.2 Prinsip Dana Alokasi Umum

1. Kecukupan (*adequacy*)

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Dalam hal ini, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi Sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu

berespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas dan efisiensi (*neutrality and efficiency*)

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input. Untuk itu, sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah. Karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Dalam format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi dengan tujuan (*relevance*)

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Kami berpendapat sudah selayaknyalah alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari: (1) beban fungsi yang dijalankan; (2) hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua UU telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Keadilan (*equity*)

Pertanyaan terpenting yang berkaitan dengan isu pemerataan ini adalah: apa yang ingin diratakan lewat instrumen DAU? Umumnya orang berpendapat DAU harus bertujuan untuk meratakan pendapatan antar daerah (keadilan).

6. Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi. Untuk itulah maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Dalam kaitan itulah maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

7. Kesederhanaan (*simplicity*)

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampaui kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Besaran dana alokasi umum diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah sehingga jumlah yang diterima masing-masing daerah berbeda. Ketentuan dalam pengalokasian DAU menurut Undang-undang seperti dijelaskan Halim (2007:54) adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN;

2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas;
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

2.1.4.1 Arti dan Tujuan

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

DAK diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah;

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur;
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur;
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan;
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD;
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

2.1.4.2 Pengalokasian DAK

Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan

2. penentuan besaran aloksi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah yang menetima DAK dengan melalui mekanisme penetapan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pasal 55 PP No. 55/2005). Dalam bentuk formula, kriteria umum tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

Untuk menjaga peruntukan DAK agar tepat sasaran, maka menurut PP No. 55/2005 alokasi DAK ditentukan dengan melihat keberadaan dana lainnya di daerah yang bersangkutan, seperti DBH, dan DAU.

2. Kriteria khusus

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu:

- a. Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil.
- b. Karakteristik daerah yang meliputi: daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

3. Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni:

- a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;

- c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- d. Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;
- e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;
- g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
- h. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional;
- i. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;
- j. Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan dirumuskan oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- k. Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan.

2.1.5 Indek Pembangunan Manusia

Tujuan pembangunan dalam arti luas adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, ini berarti sebagai proses yang berkesinambungan atas satu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Menuju manusia atau masyarakat yang lebih baik ini menurut Gauet (dalam Nehen, 2012:78) paling tidak harus memenuhi tiga komponen dasar atau nilai inti yaitu kecukupan, harga diri, dan kebebasan. Ketiganya berkaitan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar.

Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas, tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan

ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang belum tentu merata, maka ukuran keberhasilan pembangunan secara lebih nyata dapat dilihat dari kesejahteraan.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu IPM atau *Human Development Index* (HDI). IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita untuk melihat kemajuan pembangunan yang selama ini digunakan. IPM dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah dengan alasan:

1. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia.
2. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
3. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk.
4. Meskipun dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan yaitu masa hidup, pengetahuan, dan standar kehidupan. Konsep IPM menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu:

1. Angka harapan hidup untuk mengukur capaian di bidang kesehatan.
2. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur capaian di bidang pendidikan.

3. Standar kehidupan yang layak, yang diindikasikan dengan logaritma normal dari produk domestik bruto perkapita penduduk dalam paritas daya beli.

Komponen lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah), indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas :

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Dimana :

X1 = Lamanya hidup

X2 = Tingkat Pendidikan

X3 = Tingkat kehidupan yang layak

$$\text{Indeks } X(I,J) = (X(I,J) - X(i-\text{min})) / (X(I,J) - X(i-\text{max}))$$

Dimana :

X(I,J) = Indikator ke-I dari daerah J

X(i-min) = Nilai minimum dari Xi

X(i-max) = Nilai maksimal dari Xi

1. Lamanya Hidup (*Longevity*)

Perhitungan dilakukan secara tidak langsung berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Tingkat Pendidikan

Komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu: angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf adalah persentase dari pendidik usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh

jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Tabel 2.1 menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan, rata-rata lama sekolah (MYS) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{MYS} = \text{tahun konversi} + \text{kelas tertinggi yang pernah diduduki} - 1$$

Tabel 2.1 Konversi Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Konversi
1.	Tidak pernah sekolah	0
2.	SD	6
3.	SMP	9
4.	SMA	12
5.	D1	13
6.	D2	14
7.	D3	15
8.	D4/S1	16
9.	S2	18
10.	S3	21

Sumber: BPS Jatim

3. Standar Hidup

Komponen standar hidup dalam perhitungan IPM didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Menghitung pengeluaran per kapita dari modul SUSENAS (=Y)
- b. Menaikkan nilai Y sebesar 20% (=Y), karena berbagai studi diperkirakan bahwa data dari SUSENAS cenderung lebih rendah dari 20%;
- c. Menghitung nilai daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) untuk setiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relative terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar;

- d. Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasikan Y1 dengan indeks harga konsumen (CPI) ($=Y2$);
- e. Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh Rupiah yang sudah disetarakan antar daerah ($=Y3$);
- f. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli ($=Y4$). Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Murni, Elida (2008)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data PDRB atas harga konstan, realisasi PAD, DAU dan DAK kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda. Hasil analisis dari penelitian ini membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Rezka, Prakarsa Ardani (2009)

Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008). Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efek pelaksanaan otonomi daerah yang dibiayai APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Objek penelitian ini adalah data-data keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa

Timur dari tahun 2001-2008, yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan untuk Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan secara parsial menunjukkan hanya Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Pengeluaran Anggaran Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Supatman (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Modal serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Obyek penelitian meliputi Laporan Realisasi APBD dan PDRB Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang laporan keuangannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama tiga tahun berturut-turut, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Realisasi APBD sebagai variabel bebas yang dilihat pengaruhnya terhadap variabel tak bebas yaitu Belanja Modal, selanjutnya dilihat dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) DAU, DAK dan PAD secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal; (2) DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal; (3) DAK dan PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal; (4) Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah; (5) DAU dan PAD secara langsung berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

4. Yulian Rinawaty Taaha, Nursini dan Agussalim (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap investasi swasta, pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap

pertumbuhan ekonomi dan pengaruh DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu selama runtun waktu 9 tahun (2001-2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta

5. Maria Yunitasari (2007)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia Propinsi Jawa Timur dan melihat seberapa besar faktor tersebut mempengaruhi pembangunan manusia di Jawa Timur. Analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia Propinsi Jawa Timur diestimasi dengan menggunakan 6 (enam) variabel penjelas, yaitu variabel PDRB per kapita, kemiskinan, peran perempuan, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan. Untuk menunjukkan adanya kebijakan desentralisasi politik, administratif, dan fiskal, dimasukkan dummy otonomi daerah ke dalam model.

PDRB per kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia dengan nilai koefisien 0,008. Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia dengan nilai koefisien sebesar -0,04. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia dengan nilai koefisien 0,019. Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia dengan nilai koefisien sebesar -0,006. Kebijakan otonomi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia dengan nilai koefisien 0,018. Sedangkan peran perempuan, yang dalam hal ini diwakili oleh indeks pemberdayaan jender (IDJ) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan manusia dengan nilai koefisien 0,005.

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Penulis	Variabel	Obyek Penelitian	Hasil Penelitian
Elida (2008)	Independen: Pertumbuhan Ekonomi Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat tahun 2004 sampai dengan tahun 2006	PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Rezka (2009)	Independen: Pertumbuhan Ekonomi Dependen: Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin	Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008	Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pengeluaran Anggaran Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Supatman (2011)	Independen: Pertumbuhan Ekonomi Intervening: Belanja Modal Dependen: DAU, DAK, dan PAD	Laporan Realisasi APBD dan PDRB Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, DAK dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU dan PAD secara langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Taaha, dkk (2011)	Independen: Pertumbuhan Ekonomi Intervening: Belanja Modal Dependen: DBH, DAU, DAK	Provinsi Sulawesi Tengah	DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta.
Yunitasari (2007)	Independen: Pertumbuhan Ekonomi Dependen: PDRB per kapita, kemiskinan, peran perempuan, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan	Propinsi Jawa Timur	PDRB, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, dan kebijakan otonomi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Sedangkan peran perempuan mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan manusia.

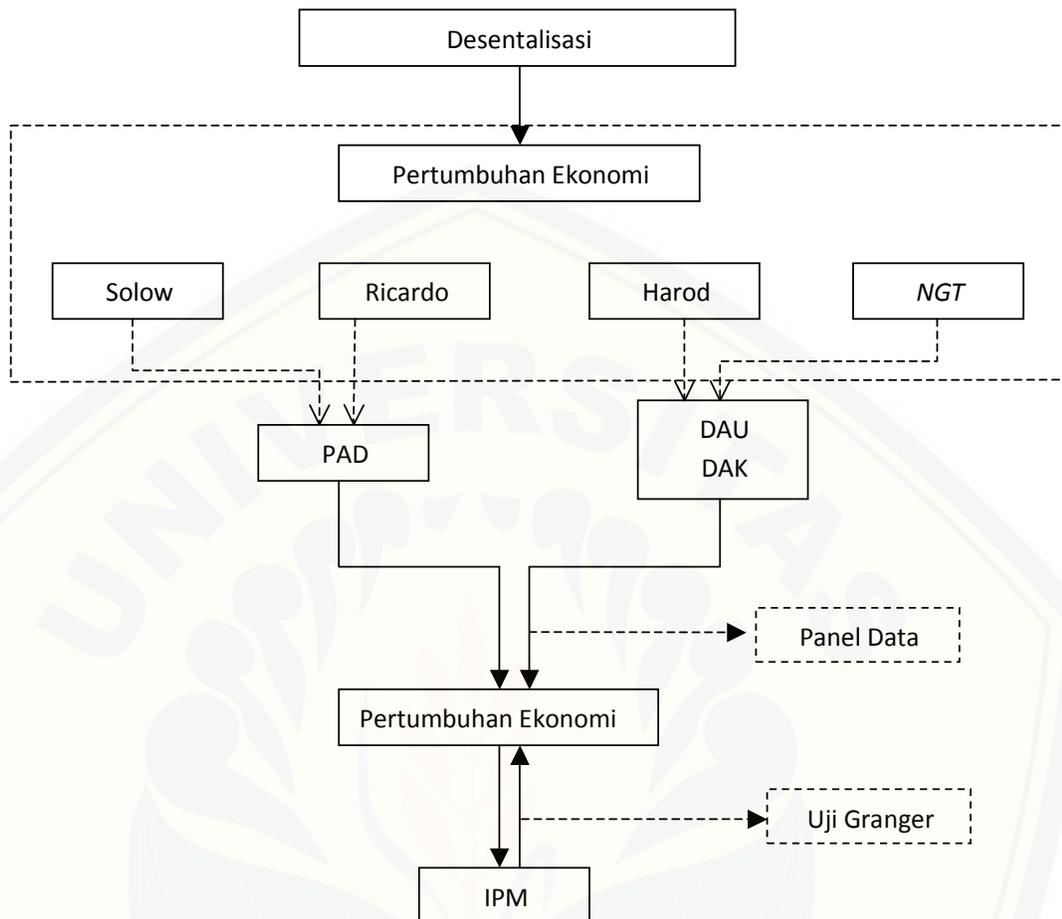
2.3 Kerangka Konseptual

Tujuan pembangunan dalam arti luas adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa pembangunan harus bias memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.

Menurut Smith (dalam Arsyad, 1999:55), mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi melalui aspek pertumbuhan output total. Sedangkan unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu 1) sumber alam yang tersedia 2) sumberdaya insani (jumlah penduduk) 3) stok barang modal yang ada. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat, tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Mengingat sumber daya alam yang terbatas, pada perkembangannya modal (*capital*) memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Arsyad, 2004:64-67).

Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi public dan penerimaan dari pajak. Keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan birokrasi sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan pembangunan. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Pemerintah memberikan dana perimbangan untuk membantu memperkecil jarak antara daerah yang kaya dan miskin. Dana perimbangan DAU dan DAK memberi manfaat bagi daerah sebagai modal melaksanakan pembangunan. DAU bersifat hibah umum (*block grant*); oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Sehingga produktivitas masyarakat semakin tinggi dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan pembangunan akan mendorong aktivitas perekonomian serta percepatan pembangunan daerah.

Tujuan dari penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah yang diinginkan pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat dapat terjamin melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan. Tanpa adanya kemajuan ekonomi secara berkesinambungan, maka realisasi potensi manusia, baik di tingkat individu maupun masyarakat tidak mungkin berlangsung.

2.4 Hipotesis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur.

4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan *Explanatory Research*, yaitu metode yang mempunyai tujuan untuk mencari dan menjelaskan ada atau tidaknya pola hubungan antara dua peubah atau lebih. Menurut Singarimbun dan Efendy (2005), *explanatory research* adalah penelitian yang terfokus pada hubungan antara variabel-variabel penelitian serta pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kinerja makro ekonomi kabupaten/kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur, dalam hal ini dapat dilihat dari besarnya PAD, DAU, DAK, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2002 sampai dengan 2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2002-2011. Data penelitian mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus diambil dari realisasi APBD masing-masing kabupaten-kota yang dipublikasikan oleh BAPPEDA Propinsi Jawa Timur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi berupa PDRB kabupaten/kota dan Indeks Pembangunan Manusia dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Panel Data

Data panel (*panel pooled data*) adalah gabungan antara *cross section* dan *time series* yang digunakan untuk melakukan analisis empirik. Dalam model data

panel persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya data *time-series*. Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it}$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Alokasi Umum

X₃ = Dana Alokasi Khusus

β₀ = Konstanta (besarnya Y apabila X₁, X₂ dianggap konstan)

β₁ = Koefisiensi Regresi Pendapatan Asli Daerah

β₂ = Koefisiensi Regresi Dana Alokasi Umum

β₃ = Koefisiensi Regresi Dana Alokasi Khusus

e = Variabel pengganggu

I = kabupaten/kota di daerah tapal kuda

T = waktu (tahun)

Regresi dengan data panel, secara umum mengakibatkan adanya kesulitan dalam spesifikasi model. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu *residual time series*, *cross section* maupun gabungan keduanya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan panel data. Penaksiran model data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *fixed effect* dan pendekatan *random effect*.

1. Model *Fixed Effect*

Teknik model *fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Oleh karena itu, ada beberapa asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien slope dan residualnya yang akan muncul yaitu (Nachrowi dan Usman, 2006:311):

1. diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu (perusahaan) dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh residual;
2. diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda antar individu;
3. diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu;
4. diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu;
5. diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

Teknik yang sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dikenal dengan estimasi *common effect*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Adapun persamaan pendekatan *fixed effect* secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j X_{it}^j + e_{it}$$

Dimana:

- Y_{it} = variabel terikat di waktu t untuk unit *cross section* i
 α_i = intersep yang berubah-ubah antar *cross section* unit
 β_j = parameter untuk variabel ke j
 X_{it}^j = variabel bebas j di waktu t untuk unit *cross section* i
 e_{it} = komponen error di waktu t untuk unit *cross section* i

Model estimasi *fixed effect* menggunakan asumsi terbebasnya model dari autokorelasi, maka uji tentang autokorelasi dapat diabaikan. Karena data yang digunakan adalah data *cross section* maka diduga terdapat heteroskedastisitas.

2. Model *Random Effect*

Di dalam mengestimasi data panel dengan *fixed effect* melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasinya dapat menggunakan variabel residual yang dikenal sebagai metode *random effect*. Karena adanya korelasi antara residual maka teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, maka metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effect* adalah *Generalized Least Square* (Nachrowi dan Usman, 2006:311).

Model efek random ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam model data panel. Penggunaan model efek random ini dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya. Model efek random dapat ditulis dalam persamaan berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_j X_{it}^j + \omega_{it}; \quad \omega_{it} = \varepsilon_{it} + V_i + W_{it}$$

Dimana:

$\varepsilon_i \sim N(0, \delta_\varepsilon^2)$ = komponen *cross section error*

$v_i \sim N(0, \delta_v^2)$ = komponen *time series error*

$w_i \sim N(0, \delta_w^2)$ = komponen *error* kombinasi

dengan asumsi bahwa *error* secara individual tidak saling berkorelasi begitu juga dengan *error* kombinasinya.

3. Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk melihat konsistensi pendugaan dengan OLS, sehingga dapat diputuskan kelayakan penggunaan model data panel. Jika nilai statistik *Hausman* lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik *Hausman* lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect* (Nachrowi dan Usman, 2006:318). Uji statistik akan mendasarkan pada:

$$\tilde{q}_1 = \hat{\beta}_{GLS} - \tilde{\beta}_{within}; \quad H_0, \quad p \lim \tilde{q}_1 = 0 \quad \text{cov}(\hat{q}_1, \hat{\beta}_{GLS}) = 0$$

Selanjutnya test statistik *Hausman* dilakukan sebagai berikut:

$$m_1 = q_1' \left[\text{var}(q_1) \right]^{-1} q_1$$

dimana H_0 *asymptotic* berdistribusi sebagai χ_K^2 di mana K adalah dimensi vektor slope β . Selanjutnya guna memenuhi aspek teknis operasional, Ω akan digantikan oleh konsistensi estimator, sehingga GLS akan memungkinkan untuk dilakukan. Penolakan terhadap statistik Hausman tersebut berarti penolakan terhadap *fixed effect model* atau *dummy variabel model*, sehingga semakin besar nilai statistik Hausman tersebut, semakin mengarah kepada penerimaan dugaan *error components model*.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini merupakan uji terhadap kriteria ekonometrika yang meliputi uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah estimasi yang diperoleh tidak terjadi bias (*Best Linier Unbiased Estimator*). Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian ekonometrika yang digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah dijumpai adanya autokorelasi maka digunakan uji Durbin-Watson test.

Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hasil perhitungan (d) dengan nilai batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) yang ada pada tabel Durbin-Watson, sedangkan kepercayaan dengan melibatkan lima wilayah dengan melibatkan d_l (batas bawah) dan d_u (batas atas) (Santoso, 2001), sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 0 < d < d_l &= \text{menolak hipotesis nol; ada autokorelasi} \\ d_l \leq d \leq d_u &= \text{daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan} \end{aligned}$$

- $d_u \leq d \leq 4 - d_u$ = menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif/negatif
- $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$ = daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
- $4 - d_L \leq d \leq 4$ = menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Ghozali, 2005:103).

Dalam pengolahan data panel dalam *Eviews* yang menggunakan metode *Pooled EGLS (Cross section Weights)*, maka untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan membandingkan *Sum Square Resid* pada *Weighted Statistics* dengan *Sum Squared Resid Unweighted Statistics*. Jika *Sum Square Resid* pada *Weighted Statistics* < *Sum Squared Resid* pada *Unweighted Statistics*, maka terjadi heteroskedastisitas. Perlakuan untuk pelanggaran tersebut adalah dengan mengestimasi GLS dengan *White Heteroskedasticity*.

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat (kombinasi linier) diantara variabel bebas. Untuk mengetahui pada model regresi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari t dan F-statistik. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dari nilai R^2 tinggi tetapi sedikit sekali koefisien dugaan yang mempunyai pengaruh signifikan dan tanda koefisien regresi tidak sesuai dengan teori. Multikolinieritas dalam data panel dapat diatasi dengan pemberian pembobotan (*cross section weight*) atau GLS, sehingga parameter dugaan pada taraf uji tertentu (t-statistik maupun F-hitung) menjadi signifikan.

3.4.3 Uji Hipotesis

1. Uji F (*F-test*)

Uji ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar arti signifikansi hubungan secara simultan antara variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Nilai F hitung dicari dengan rumus (Santoso, 2001):

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana R^2 = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel

n = jumlah observasi

Kriteria pengujian :

- a) Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} tingkat signifikansi 5%, maka H_0 ditolak H_a diiterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi
- b) Jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} tingkat signifikansi 5%, maka H_0 diterima H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara antara PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Uji t (*t-test*)

Uji t ini digunakan untuk menguji signifikansi secara parsial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t dengan formulasi sebagai berikut :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Dimana β_i = koefisien regresi dari X_1 dan X_2 .

$S\beta_i$ = standar deviasi

Kriteria pengujian :

- a) Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh signifikan antara variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi

b) Jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Uji Determinasi Berganda (Uji R^2)

Uji Determinasi Berganda ini digunakan untuk mengetahui kekuatan pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien determinasi dari model regresi dihitung dengan rumus sebagai berikut (Santoso, 2001):

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y}{\sum y^2}$$

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Artinya bila koefisien determinasi semakin mendekati nilai 1, maka sebagian besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3.4.4 Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas *Granger* dapat digunakan untuk mengetahui apakah satu variabel mempunyai hubungan dengan variabel lain. Hubungan ini bisa bersifat satu arah atau dua arah. Pada intinya uji kausalitas *Granger* mendasarkan pada pengaruh masa lalu terhadap kondisi masa sekarang, sehingga data yang digunakan adalah data *time series*.

Pengujian kausalitas *Granger* digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing kabupaten/kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur. Bentuk persamaan uji kausalitas *Granger* adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \sum_{i=1}^n a_i Y_{t-i} + \sum_{i=1}^n b_i X_{t-i} + u_t$$

Dimana:

Y_t = besarnya IPM di masing-masing kabupaten/kota pada kurun waktu ke-t

Y_{t-1} = besarnya IPM di masing-masing kabupaten/kota pada kurun waktu sebelum t (t-1)

X_{t-1} = besarnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada kurun waktu sebelum t ($t-1$)

b_i = koefisien regresi pertumbuhan ekonomi pada IPM = $f(1)$

U_t = *error terms*, diasumsikan tidak mengandung korelasi serial

Formulasi di atas adalah untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, cara yang sama dapat juga diterapkan untuk melihat pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hasil dari pengujian kausalitas Granger akan menghasilkan empat kemungkinan keputusan yaitu :

1. terdapat kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke IPM;
2. terdapat kausalitas satu arah dari IPM ke pertumbuhan ekonomi;
3. pertumbuhan ekonomi dan IPM saling bebas antara satu dengan yang lain;
4. terdapat kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM.

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Sumber PAD yang berasal dari total pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing kabupaten/kota wilayah tapal kuda Jawa Timur (dalam jutaan rupiah);

2. Dana Alokasi Umum (X_2)

DAU adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum diukur dari realisasi transfer pemerintah pusat ke masing-masing kabupaten/kota (dalam jutaan rupiah);

3. Dana Alokasi Khusus (X_3)

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus

diukur dari realisasi transfer pemerintah pusat ke masing-masing kabupaten/kota (dalam jutaan rupiah).

4. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam analisis ini adalah prosentase pertumbuhan PDRB dari tahun t dengan tahun $t-1$. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB dasar harga konstan tahun 2000.

5. Indeks Pembangunan Manusia (Z)

Indeks Pembangunan Manusia masing-masing kabupaten/kota di wilayah tapal kuda Jawa Timur menggunakan nilai IPM dari BPS Jawa Timur.

